

Pengajuan Amicus Curiae Perkara PPHU Presiden 2024

andri_prasetia13@yahoo.com

Sabtu 20/04/2024 01.20

Ke: Sekretariat Mahkamah Konstitusi <office@mkri.id>;

Bismillahirrahmaanirrahiim..

Kepada para Hakim yang kami muliakan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) adalah institusi yang lahir di era Reformasi. Kelahiran MK RI merupakan perkembangan yang luar biasa dalam sebuah negara yang terus memperbaharui ketatanegaraannya. Keberadaan MK RI kemudian menjadi berat sekaligus mulia, yaitu sebagai Pengawal Tegaknya Konstitusi Republik Indonesia.

Reformasi dan Demokrasi erat kaitannya dengan Konstitusi dalam Negara Hukum; yang artinya proses dan hasil Demokrasi yang diselenggarakan harus sesuai dengan Etika dan Koridor Hukum Positif yang berlaku.

Salah satu tonggak Demokrasi yang telah diselenggarakan adalah Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024.

Dalam perkembangan proses Pemilu 2024, MK RI telah memproses dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 yang dimohonkan oleh dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait PHPU Presiden 2024 tersebut, kami berharap Para Hakim yang mulia tidak berhenti dengan hanya mempertimbangkan ihwal kuantitatif seperti Besar-Kecil ataupun Banyak dan Sedikitnya an sich, namun para Hakim yang mulia secara seksama mempertimbangkan semua Prinsip-Prinsip Dasar dan Nilai Negara Bangsa (Pancasila), Konsep Republik beserta derivasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait untuk kemudian menelaah secara komprehensif konsistensi pelaksanaannya.

saya: andri prasetia, sebagai Warga Negara Republik Indonesia, seorang warga biasa, yang bukan Anggota Partai manapun bahkan juga bukan Tim Sukses salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2024 berdoa agar Tuhan YME membimbing dan memberi petunjuk kepada 9 Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden pada Senin 22 April 2024 mendatang.

Para Hakim MK RI yang kami muliakan, harap diingat dan diresapi, putusan PHPU Presiden 2024 ini akan berimbas besar bagi perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa, sebagai Negara Hukum dan sebagai sebuah Republik.

Thus, Putusan PHPU Presiden 2024 ini akan diingat, dicatat dan dikaji bukan hanya dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, tapi akan dicatat terus menerus dan menjadi Ingatan Kolektif Rakyat Indonesia dalam puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun ke depan; artinya nama-nama Para Hakim akan dicatat dan diingat oleh Generasi mendatang.

Saya berharap Republik Indonesia kembali menemukan Leidstar dalam bertata negara melalui Musyawarah, Pertimbangan dan Putusan Para Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Memperbaiki suatu proses yang keliru lebih penting dibandingkan dengan memberikan putusan yang permisif yang akan menggelindingkan kesalahan fundamental bagi Republik Indonesia.

Anomali Demokrasi di Indonesia terjadi juga di belahan dunia lain, Gideon Rachman seorang Jurnalis Inggris menangkap fenomena tersebut dengan mengatakan:

"Durable political systems ultimately rely on institutions, not individuals".

Di sinilah tugas penting para Hakim MK RI yang kami muliakan.

Pernyataan itu sesungguhnya bukan hal yang baru, karena Bung Hatta dalam Demokrasi Kita telah mengingatkan:

"Demokrasi yang tidak kenal batas

kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi

anarki, lambat laun akan digantikan diktator."

Kiranya tidak bisa begitu panjang yang bisa kami sampaikan.

sekali lagi, dengan kerendahan hati, semoga Tuhan YME membimbing dan memberi petunjuk kepada para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi Rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merdeka.

Sabtu 20 April 2024.

andri prasetia